

PERFORMA BAHASA DAN KESANTUNAN KOMUNIKASI LISAN PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KABUPATEN DI SUMATRA BARAT

Sri Nurani, Ermanto

Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Padang

Email: Srinurani07@gmail.com

Abstract

This study aims to describe: (1) the performance of formal sentence structures in oral communication of district-level legislative and party leaders in West Sumatra, (2) standard vocabulary performance in verbal communication at district level legislative and party leaders in West Sumatra, (3) the principle performance of courtesy in oral communication of district-level legislative and party leaders in West Sumatra; and (4) the performance of the principle of cooperation in the oral communication of district-level legislative and party leaders in West Sumatra. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The data of this study are the utterances of legislative and party leaders in West Sumatra in oral communication. The methods and data collection techniques used are the referral method, with advanced techniques, namely the note-taking technique. The technique of validating data is a detailed description technique, namely describing in detail the data to be interpreted. Data analysis methods and techniques are carried out by identifying data, transcribing, entering data into a format, classifying data, interpreting data, and concluding data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded the following matters. (1) The performance of the use of formal sentence structures in oral communication of district legislators and party leaders in West Sumatra is quite sufficient (66%) of 150 data. West Sumatra is quite sufficient (66.7%) of 150 data. (3) The performance of the principle of manners in oral communication of legislative officials and party leaders at the district level in West Sumatra, the principle of courtesy is quite sufficient (67.3%) of 150 data. (4) The performance of the principle of cooperation in oral communication of legislative officials and district leaders in West Sumatra is classified as good (81.3%) of 150 data.

Keywords: *Performance, Oral Communication, Legislative Officials, Party Leaders*

A. Pendahuluan

Menurut Cengara (2014: 38), komunikasi publik atau *public speaking*, menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Penyampaian pesan berlangsung secara kontinu. Komunikasi ini membutuhkan keterampilan komunikasi lisan agar pesan dapat disampaikan dengan efektif dan

efisien. Tujuannya untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan dan membujuk.

Keterampilan komunikasi lisan berpengaruh terhadap kesantunan seseorang dalam berinteraksi. Kesantunan menuntut semua pihak agar saling melindungi fisik maupun emosi. Penutur sebaiknya menghindari kata-kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan lawan tutur dengan berbicara lemah lembut, sopan santun, sistematis, jelas dan lugas. Selain itu juga harus menaati kaidah-kaidah kebahasaan yang benar. Sehingga terjalin interaksi sosial yang mencerminkan kesantunan dalam berbahasa.

Menurut UU nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat pada pasal 39 Ayat 1 dan 2 berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus." Penggunaan bahasa Indonesia ternyata masih sering dilanggar oleh beberapa pihak, baik perorangan atau sekelompok orang. Penutur harus mengutamakan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di ruang publik seperti balai bahasa, pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pihak swasta, komunitas-komunitas, media, dan warga masyarakat.

Secara hierarki orang yang memiliki kedudukan atau peran yang tinggi akan membuka percakapan dengan sopan dan santun, misalnya pejabat legislatif dan para tokoh partai. Pejabat legislatif dan para tokoh partai memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi seperti wawancara, pidato, kampanye, penyuluhan dan sebagainya di depan publik. Pejabat legislatif dan tokoh partai juga diperbolehkan menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing untuk tujuan khusus disesuaikan dengan sasaran.

Seorang pejabat politik adalah seorang tokoh partai hendaknya memilih bahasa dan kata yang tepat saat bertutur. Bahasa yang digunakan pejabat legislatif memperlihatkan kemampuan bahasa dan kesantunannya dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan mereka sering berargumen, menanggapi suatu pernyataan, dan pertanyaan maupun orasi politik di depan publik. Kondisi, situasi, dan topik

merupakan faktor yang mengharuskan penutur memakai kosakata maupun kalimat-kalimat tertentu. Dalam berbagai situasi pejabat legislatif sering melakukan kesalahan dalam menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia ketika berbicara. Hal itu dapat mengurangi performa bahasa dan kesantunan lisannya dalam berkomunikasi.

Ermanto, Agustina, dan Emidar (ICCLA,2018:315) pejabat pemerintah sebagai pejabat publik harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama. Komunikasi lisan atau komunikasi tertulis harus dilakukan oleh pejabat yang baik dan sopan. Jika tidak benar dilakukan dan sopan, beberapa kemungkinan negatif yang akan terjadi adalah (1) pejabat akan direndahkan oleh komunitas, (2) pejabat tidak dihargai oleh masyarakat, (3) pesan yang disampaikan oleh pejabat tidak diterima secara efektif oleh masyarakat, 4) komunikasi yang salah tempat dengan masyarakat, (5) kebisingan komunikasi, dan sebagainya.

Penelitian mengenai performa bahasa dan kesantunan pernah dilakukan oleh Alvionita, Ermanto dan Agustina (2018) yang berjudul "Performa Bahasa Indonesia dari Segi Penggunaan Struktur Kalimat Bupati di Sumatra Barat dalam *Youtube*." Maiyola, Ermanto, dan Agsustina (2018) dengan judul penelitian "Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Lisan Walikota di Sumatra Barat." Anggrina, Ermanto, dan Emidar (2018) dengan judul "Performa Penggunaan Kosakata oleh Guubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat di dalam *Youtube*."

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan performa bahasa dan kesantunan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat bagaimana tokoh politik lokal khususnya pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten dalam menggunakan bahasa dan kesantunan dalam komunikasi lisan. Berdasarkan rekaman video kegiatan yang mereka lakukan yang diunggah ke *youtube*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penulis memfokuskan pada tuturan yang dilakukan pejabat

legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten di Sumatra Barat. Sumber data penelitian adalah pejabat legislatif dan tokoh partai yang melakukan wawancara yang diunduh dari media sosial yaitu *youtube*. Teknik pengumpulan data ada penelitian ini dilakukan dengan metode simak. Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik catat. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai dengan urutan sebagai berikut : (1) mengidentifikasi data-data berupa video dari *Youtube* berupa tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai yang termasuk ke dalam performa bahasa dan kesantunan komunikasi, (2) memasukan data ke dalam format, yaitu penggunaan struktur, penggunaan kosaksata, penggunaan prinsip kesantunan, dan penggunaan prinsip kerja sama, (3) menginterpretasi data performa bahasa dan kesantunan komunikasi sesuai dengan data yang diteliti, dan (4) menyimpulkan data berdasarkan data yang telah dianalisis. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan *persentages correction*. Besarnya nilai yang diperoleh merupakan persentase dari persentase maksimum yang seharusnya dicapai. Purawanto (2006:102), *persentages correction* dengan rumus penilaian. Penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam persentase. Persentase tersebut dapat menggambarkan tingkat penguasaan. Tingkat penguasaan terbagi menjadi lima bagian : predikat sangat baik dengan persentase 86-100%, predikat baik dengan persentase 76-85%, predikat cukup dengan persentase 60-75%, predikat kurang dengan persentase 55-59%, dan predikat kurang sekali dengan persentase <54 %.

C. Hasil dan Pembahasan

Komunikator sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi memegang peranan yang penting. Syarat utama komunikator harus terampil dalam komunikasi agar komunikasi yang dilakukan mengena sasaran. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah media yang digunakan dan khalayak yang akan menerima pesannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak melihat para komunikator berbicara di media sosial *youtube*, misalnya pejabat legislatif dan tokoh partai.

Jika kita merujuk hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa saja terjadi pada unsur pendukungnya. Misalnya gangguan

semantik, ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Menurut Blake (Cengara, 2018:174), gangguan semantik sering terjadi karena kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan jargon bahasa asing atau bahasa tertentu yang sulit dimengerti, bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa penerima, struktur bahasa yang digunakan membingungkan penerima, dan latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.

Pejabat legislatif dan tokoh partai sebagai komunikator sudah semestinya memiliki keterampilan komunikasi lisan yang baik. Ada empat aspek untuk melihat kemampuan pejabat legislatif dan tokoh partai dalam komunikasi lisan khususnya pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat, yaitu struktur kalimat, kosakata baku, prinsip sopan santun, dan prinsip kerja sama.

1. Performa Penggunaan Struktur Kalimat dalam Komunikasi Lisan oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai tingkat Kabupaten di Sumatra Barat

Peneliti berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Alwi mengenai struktur kalimat. Alwi (2003:322), pola kalimat dasar bahasa Indonesia terdapat enam tipe pola kalimat dasar antara lain, Subjek-Predikat (SP), Subjek-Predikat-Objek (SPO), Subjek-Predikat-Pelengkap(SPPel), Subjek-Predikat-Keterangan (SPKet), Subjek-Predikat-Objek-Pelengkap (SPOPel), dan Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (SPOKet). Selain itu, peneliti juga berpedoman pada teori yang dikemukakan Chaer (2012:241), mengenai jenis kalimat berdasarkan struktur klausanya yakni kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Berikut contoh penggunaan struktur kalimat lengkap dan tak lengkap.

(1) Jadi rapat-rapat ini secara terbuka. (T2D6)

(S)

(P)

Contoh kalimat (1) merupakan salah satu pola struktur kalimat lengkap dengan pola Subjek-Predikat (SP). Kalimat (1) menunjukkan adanya pola kalimat dasar yang memenuhi unsur subjek dan predikat. Frasa *jadi rapat-rapat ini* merupakan frasa nomina yang berfungsi sebagai *subjek*. Kemudian frasa kedua yaitu *secara terbuka* merupakan verba yang berperan sebagai *predikat*. Penggunaan struktur kalimat lengkap ini tergolong tepat karena memenuhi unsur wajib subjek

dan predikat. Tuturan berupa kalimat lengkap dapat memberikan kejelasan informasi bagi penerima pesan.

(2) Jadi saya kan selalu dengan satu proses aturan, asas dengan aturan.

(S)

(Ket.Cara). (T1D1)

Contoh kalimat (2) merupakan struktur kalimat tak lengkap. Frasa pertama, *jadi saya kan* merupakan frasa nomina yang berfungsi sebagai *subjek*. Kemudian frasa kedua yaitu *selalu dengan satu proses aturan, asas dengan aturan*, frasa kedua berfungsi sebagai *keterangan cara*. Keterangan cara ditunjukkan dengan penggunaan kata *dengan* yang menunjukkan adanya keterangan cara. Kalimat (2) tidak memenuhi kalimat lengkap karena kalimat lengkap wajib memiliki unsur predikasinya. Penggunaan struktur kalimat di atas tepat meskipun tidak memiliki unsur predikat. Hal ini dikarenakan tuturan yang dapat memberikan kejelasan informasi oleh penerima.

2. Performa Penggunaan Kebakuan Kosakata dalam Komunikasi Lisan oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat

Menurut Ermanto dan Emidar (87-90), kosakata baku dan tidak baku dapat dilihat dari tiga ranah seperti ranah fonologis, ranah morfologis, dan ranah leksikon. *Pertama*, kata baku dan nonbaku dapat dilihat berdasarkan fonologis. Sebuah kata baku terkadang memiliki kata nonbaku karena penambahan dan pengurangan fonem. *Kedua*, kata baku dan kata nonbaku dapat pula dilihat dari ranah morfologis. Sebuah kata terkadang memiliki kata nonbaku karena hasil poses morfologis terjadinya pergantian afiks, kelebihan fonem, dan pengurangan fonem. *Ketiga*, kata baku dan nonbaku dilihat dari ranah leksikon. Sebuah kata (frasa) terkadang memiliki kata (frasa) nonbaku yang terdapat dalam ragam percakapan. Contoh penggunaan kosakata baku dan tidak baku sebagai berikut.

(3) Ah ini tugas kita sebagai masyarakat. (T1D22)

Contoh kalimat (3) termasuk ke dalam kosakata baku. Jika dilihat dari ranah fonologisnya, tidak ada perubahan fonem seperti pengurangan, penghilangan dan penambahan fonem. Kata *Ah* ini termasuk kosakata baku. Dalam KBBI V kata *Ah* berkategori partikel yang memiliki makna *kata seru yang menyatakan perasaan kecewa, menyesal, keheranan, dan tidak setuju*. Kata *ini* merupakan kelas pronomina

yang bermakna kata penunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara. Kata *tugas* merupakan nomina yang bermakna yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Kata *kita* merupakan pronomina persona jamak yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak bicara. Kata *sebagai* merupakan partikel yang bermakna kata depan untuk menyatakan hal yang serupa. Kata *masyarakat* merupakan nomina yang bermakna sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Penggunaan kosakata baku di atas adalah tepat. Pemilihan kosakata yang digunakan penutur bertujuan agar penerima pesan tidak kebingungan dalam menerima informasi.

(4) **Mustinya** seluruh stek Polda termasuk para calon dan para kader yang ada di bawah mematuhi dan **mentaati** apa yang menjadi keputusan DPP tadi yang mana pelaksanaannya tanggal 15 April 2018 kemarin.(T4D9)

Contoh kalimat (4) terdapat dua buah penggunaan kosakata tidak baku yakni kata *mustinya* dan kata *mentaati*. Kata *mustinya* mengalami penghilangan fonem *e* menjadi fonem *u*. Kata *mustinya* bentuk tidak baku dari *mestinya* yang bermakna *pasti atau tentu, tidak boleh tidak, dan harus*. Makna *mesti* disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Kata tidak baku kedua yaitu *mentaati*, *mentaati* merupakan kata dasar yang telah melalui proses morfologis prefiks *me-* dan *-i*. Kata dasar *taat* berubah menjadi *menaati* setelah melalui proses morfologis dengan prefiks *me-* + *taat* (kata dasar) + *-i*. Kata *menaati* memiliki makna mematuhi dan menurut perintah, aturan dan sebagainya. Pemilihan kosakata yang digunakan penutur bertujuan agar penerima pesan tidak kebingungan dalam menerima informasi. Namun untuk lebih baik lagi kosakata yang tidak baku tersebut dapat diubah menjadi lebih baik lagi. Perbaikan contoh kalimat di atas seperti berikut.

(4a) **Mestinya** seluruh stek Polda termasuk para calon dan para kader yang ada di bawah mematuhi dan **menaati** apa yang menjadi keputusan DPP tadi yang mana pelaksanaannya tanggal 15 April 2018 kemarin.(T4D9)

(5) Bahkan buka **basamo** di Nagari Barugunug dibangun dalam

mengkhatib ramadhan tapi tiga tahun sampai saat ini jalan itu masih seperti ini. (T8D12)

Contoh kalimat (5) terdapat satu buah penggunaan kosakata tidak baku yakni kata *basamo*. Kata *basamo* sering kali digunakan oleh penutur yang berasal dari daerah Minangkabau. Biasanya penutur yang menggunakan kata *basamo* ini didominasi oleh orang yang berasal dari Minangkabau. Munculnya kosakata tidak baku ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kata *basamo* memiliki makna *bersama*. Kalimat di atas bisa diubah seperti berikut.

(5a) Bahkan buka **bersama** di Nagari Barugunug dibangun dalam mengkhatib ramadhan tapi tiga tahun sampai saat ini jalan itu masih seperti ini. (T8D12)

(6) Lalu yang ketiga adalah bagaimana kalau ada perbuatan oknum itu yang merendahkan martabat partai dan merusak citra dan nama baik partai dan bahkan memenuhi kualifikasi kejahatan dalam sebuah **crime kejahatan** pidana. (T4D26)

Kalimat (6) terdapat frasa penggunaan kosakata tidak baku yakni kata *crime kejahatan*. Kata *crime* tidak baku disebabkan bahasa asing. *Cime* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna *kejahatan*. Dari kalimat (6) meski pengucapannya dan penulisannya berbeda tetapi makna keduanya sama. Penggunaan kalimat di atas dapat diperbaiki seperti contoh kalimat berikut.

(6a) Lalu yang ketiga adalah bagaimana kalau ada perbuatan oknum itu yang merendahkan martabat partai dan merusak citra dan nama baik partai dan bahkan memenuhi kualifikasi kejahatan dalam sebuah **crime kejahatan** pidana. (T4D26)

3. Performa Penggunaan Prinsip Sopan Santun dalam Komunikasi Lisan oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat

Menurut Leech (1993:170), sopan santun adalah usaha untuk membuat kemungkinan adanya keyakinan-keyakinan dan pendapat-pendapat tidak sopan sekecil mungkin. Penutur harus mematuhi enam maksim percakapan, yakni maksim

kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti tidak menemukan tuturan para pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatera Barat yang melanggar maksim kedermawanan. Hal ini karena para pejabat tidak ada yang berkata kasar. Sebagian tuturan mereka mengarah kepada tuturan yang memojokkan lawan tutur, protektif dengan pendapatnya, dan menyindir seseorang. Adapun analisis data kalimat penggunaan prinsip sopan santun sebagai berikut.

a. Sesuai Prinsip Sopan Santun

Apabila setiap orang melaksanakan maksim kedermawanan dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari maka kedengkian sakit hati terhadap sesama dapat terhindar. Maksim kedermawanan berpusat pada diri sendiri. Tindak ilokusi yang sering digunakan adalah tindak ilokusi komisif. Tuturan yang melibatkan pembicara pada tindakan yang akan datang seperti menjanjikan, bersumpah, menawarkan, dan memanjatkan doa. Penggunaan maksim kedermawanan yang tepat artinya sesuai dengan prinsip sopan santun. Contoh penggunaan maksim kedermawanan yang tepat sebagai berikut.

(7) Ini yang kita harapkan. (T1D50)

(8) Saya rasa alhamdulillah. (T1D37)

Contoh kalimat (7) dan (8) tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten Padang Pariaman bernama Faisal Arifin. Dalam tuturan tersebut tidak ditemukan kata-kata kasar, mengecam atau menghina orang lain. Pembicara melibatkan lawan bicara pada tindakan yang akan datang seperti memanjatkan doa. Kalimat *ini yang kita harapkan* menegaskan harapan atau doa bersama untuk kebaikan di masa yang akan datang. Sementara untuk kalimat (8) kedermawanan ditandai dengan ucapan syukur dengan menggunakan kata *alhamdulillah* dalam tuturannya.

b. Melanggar Prinsip Sopan Santun

Maksim pujian diberi nama lain maksim rayuan, rayuan digunakan untuk pujian yang tidak tulus. Maksim ini berpusat pada orang lain, jadi penutur harus menghindari kata-kata atau ujaran yang sifatnya mengecam orang lain. Jangan

mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Penggunaan maksim pujian yang tidak tepat artinya melanggar prinsip sopan santun. Contoh penggunaan maksim pujian yang tidak tepat sebagai berikut.

(9) Sebenarnya kan peran nagari, tokoh-tokoh masyarakat itu bagaimana dia bisa mampu mengkemas, mengelola pembangunan yang dari pemerintah ini yang berdampak kepada perubahan kehidupannya baik sektor ekonominya maupun sosialnya.(T1D32)

Contoh kalimat (9) salah satu tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten Padang Pariaman bernama Faisal Arifin. Kalimat tersebut seperti menyalahkan peran nagari yang berada di daerah bersangkutan. Dari tuturan tersebut kita bisa menangkap tuturan Faisal ini mengatakan nagari tidak mampu melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Ketidakmampuan nagari dalam mengelola pembangunan yang berasal dari pemerintah. Maka nagari juga tidak akan memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi dan sosial sangat memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat. Tuturannya secara tidak langsung merendahkan pihak lain.

4. Performa Penggunaan Prinsip Kerja Sama dalam Komunikasi Lisan oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kabupaten di Sumatra Barat

Menurut Leech (1993:120), kita membutuhkan prinsip kerja sama untuk lebih mudah menjelaskan hubungan makna dan kemampuan dalam bertindak. Leech (1993:128), ada empat maksim yang harus dipatuhi dalam berkomunikasi, yakni maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Adapun analisis data dalam penggunaan prinsip kerja sama sebagai berikut.

a. Sesuai Prinsip Kerja Sama

Kegiatan bertutur sering kali mengecam lawan tuturnya. Rasa tidak nyaman akan membuat antipati semakin tinggi. Berikan informasi yang tepat dan tidak berlebih-lebihan. Indikator yang menandai maksim ini adalah penutur menghasilkan ujaran yang informatif dan memadai. Penggunaan maksim kuantitas yang tepat artinya sesuai dengan prinsip kerja sama. Contoh penggunaan maksim kuantitas yang tepat sebagai berikut.

(10) Itu pada hari ini DPRD mengadakan acara mendengarkan

ataupun menerima nota keuangan rencana APBD Tahun 2018 yang disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota. (T2D1)

Kalimat (10) salah satu tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten 50 Kota bernama Safarudin. Tuturan tersebut menggambarkan ujaran yang informatif. Beliau menyampaikan tentang acara penerimaan nota keuangan tentang RAPBD 2018 yang akan disampaikan oleh Bupati Lima Puluh Kota. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada sidang paripurna istimewa yang akan membahas nota keuangan Kabupaten 50 Kota.

b. Melanggar Prinsip Kerja Sama

Informasi yang diberikan tidak boleh melebihi informasi yang tidak dibutuhkan mitra tuturnya. Informasi yang lebih-lebihkan adalah salah satu pelanggaran dalam maksim kuantitas. Penggunaan maksim kuantitas yang tidak tepat artinya melanggar prinsip kerja sama. Contoh penggunaan maksim kuantitas yang tidak tepat sebagai berikut.

(11) Sementara jalan yang bermasalah ini kita selesaikan di belakang hari dan begitu juga jalan Gelugur Kapih Sembilan yang jeritan masyarakat sangat-sangat kita prihatinkan. (T8D18)

Kalimat (11) salah satu tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat Kabupaten 50 Kota bernama Safarudin. Klausa *jeritan masyarakat sangat-sangat kita prihatinkan*, tuturan tersebut dianggap lebih-lebihkan. Meskipun faktanya memang benar seharusnya penutur mengganti dengan kalimat yang lebih santun. Misalnya klausa *jeritan masyarakat sangat-sangat kita prihatinkan* diganti dengan klausa *masyarakat membutuhkan perhatian lebih*.

D. Simpulan dan Saran

Pertama, performa penggunaan struktur kalimat formal dalam komunikasi lisan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat tergolong cukup. Penggunaan struktur kalimat ini terbagi menjadi kalimat lengkap dan tak lengkap. Penggunaan kalimat lengkap ditemukan sebanyak 99 data dan kalimat tak lengkap sebanyak 51 data.

Kedua, performa penggunaan kosakata baku dalam komunikasi lisan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat tergolong cukup. Dilihat dari segi pemakaian kebakuan kosakata, pejabat legislatif dan tokoh partai termasuk predikat cukup. Kebakuan kosakata dilihat dari ranah fonologis, morfologis, dan leksikon dibagi menjadi dua yaitu kosakata baku dan tidak baku. Kosakata tidak baku yang ditemukan tersebut dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu, kosakata tidak baku bahasa Indonesia, kosakata tidak baku bahasa daerah (bahasa Minangkabau), dan kosakata baku bahasa asing (bahasa Inggris).

Ketiga, performa penggunaan prinsip sopan santun dalam komunikasi lisan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat tergolong cukup. Hal ini disebabkan masih ada tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai yang melanggar maksim kearifan dan maksim kesepakatan. Maksim yang sesuai dengan prinsip ditemukan sebanyak 101 data dan yang tidak sesuai ditemukan sebanyak 49 data. Peneliti tidak menemukan penutur yang maksim kedermawanan. Maksim yang digunakan oleh pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat didominasi oleh maksim kesepakatan.

Keempat, performa penggunaan prinsip kerja sama dalam komunikasi lisan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat tergolong baik. Pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat memiliki predikat baik. Hal ini disebabkan masih ada tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai yang tidak melanggar maksim hubungan. Maksim yang sesuai dengan prinsip ditemukan sebanyak 122 data dan yang melanggar ditemukan sebanyak 28 data.

Kemampuan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kabupaten di Sumatra Barat tergolong cukup. Keefektifan penggunaan struktur kalimat formal, kosakata, prinsip sopan santun tergolong cukup dan prinsip kerja sama tergolong baik. Performa bahasa dan kesantunan tersebut jauh dari harapan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh gangguan semantik dalam berkomunikasi dan yang tidak kalah penting adalah tingkat pendidikannya. Peneliti menyarankan pejabat dan tokoh partai agar dapat mematuhi kaidah penggunaan bahasa dan pemilihan kata dengan cara mengikuti penyuluhan bahasa dan memperhatikan kesantunan dalam komunikasi lisan di depan publik.

Daftar Pustaka

Alwi, dkk. (2003). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Anggrina, Ermanto & Emidar. (2018). Performa Penggunaan Kosakata oleh Gubernur dan Wakil Gubernur SumatraBarat di dalam *Youtube*. *Bahasa dan Sastra*, 5 (2), p.59-69.
- Alvionita, Ermanto & Agustina. (2018). Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Lisan Bupati di SumatraBarat. *Bahasa dan Sastra*, 5 (2).
- Chaer, Abdul. (2012). *Linguistik umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cengara, Hafied. (2018). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ermanto, Emidar. (2018). *Bahasa Indonesia pengembanagan kepribadian di perguruan tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Emidar, Ermanto, & Agustina. (2018). *Politeness Communication of Officials in West Sumatra: Riview of Principles of Politeness and Principles of Cooperation Perspective*. *ICCLA, Advancess in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 236, January 2018, p.315-319.
- Leech, Geofrey. (1993). *Prinsip-prinsip pragmatik*. Jakarta: UI Perss.
- Mahsun. (2005). *Metode penelitian bahasa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maiyola, Ermanto & Agustina. (2018) .Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi Lisan Walikota di Sumatra Barat.*Bahasa dan Sastra*, 5(2), p.75-84.
- Manaf, Juita & Ermanto. (2018). *Linguistic Performances of West Sumatera Executive Officials in Communicating via Facebook*. *ICCLA, Advancess in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 236, p.347-354.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Ngalim. (2006). *Prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012) . *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugono, Dendy. (1994). *Berbahasa Indonesia dengan benar*. Jakarta: Puspa Swara.
- Zaim, M. (2014). *Metode penelitian bahasa : pendekatan struktural*. Padang: FBS UNP PRESS Padang.